

**KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA
PERUBAHAN) 2024**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERNCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayanya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari rencana kerja perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.

Semoga dengan telah tersusunya Renja Perubahan Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien mungkin, baik dari aspek pengukuran kinerja kegiatan maupun dari aspek keuangan, sehingga dampak yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat : Bapak Bupati Bolaang Mongondow Utara , Bapak Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara dan Bapak Sekretaris daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang telah memberikan motivasi, sehingga penyusunan review atas perencanaan strategis ini dapat terselesaikan dengan baik, disamping itu memberikan penghargaan yang tinggi kepada segenap pejabat struktural, fungsional dan staf dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara guna terwujudnya penyusunan review atas perencanaan strategis ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kami memohon dengan harapan agar rencana yang telah dituangkan dapat diwujudkan dalam implementasinya.

Boroko, Juni 2024

Mengetahui,

KEPALA DINAS PPKB PP Dan PA

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA



Yani Lasama, SKM
Pembina Utama/IV B

NIP : 19741217 199703 2 003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Landasan Hukum.....	1
Maksud dan Tujuan.....	2
Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....	6
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah S/D Triwulan II Tahun 2024.....	6
Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d tahun berjalan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.....	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	19
BAB IV PENUTUP.....	25
Kesimpulan.....	25
Catatan yang Perlu Mendapat Perhatian.....	25
Kaidah-kaidah Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (RENJA).....	25
Rencana Tindak Lanjut.....	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan. Rencana Kerja Perubahan(RENJA) Dinas PPKBPP & PA Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berkenaan dengan itu baik formula maupun proses penyusunan Renstra OPD benar-benar mampu mendukung rencana pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana substansi RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga target kinerja yang tertuang dalam RPJMD dapat tercapai dan dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas PPKBPP & PA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat.

Proses penyusunan RENJA Dinas PPKBPP & PA Tahun 2024 ini didasarkan kepada RPJMD Tahun 2019 –2023 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 80).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
7. Peraturan Bupati nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Staretegis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 15).
8. Peraturan Bupati nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Renstra.
9. Peraturan Bupati nomor 35 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024–2026 secara umum telah memberikan arah dan tuntunan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama lima tahun kedepan. Isu-isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkaitan/selaras dengan Program Kependudukan dan KB antara lain: Peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan Pencapaian Target MDGs Berkaitan dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 – 2026 sebagaimana yang dijelaskan di atas serta berdasarkan Indikator dan Target Kinerja yang diharapkan dapat di capai pada tahun 2024 yang akan datang maka DPPKBPP dan PA Kabupaten Bolaang

**“Rencana Kerja Perubahan Dinas PPKB, PP dan PA “
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2024**

Mongondow Utara sebagai institusi yang mengemban tugas menyukseskan program KB dan Kependudukan perlu menyelaraskan Visi dan Misinya dengan setidaknya mempertimbangkan tiga hal: *Pertama*, pasca disahkannya UU No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga maka DPPKBPP dan PA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak lagi diamanatkan sebagai lembaga yang menangani KB semata, tetapi juga menangani masalah kependudukan. *Kedua*, dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan nasional di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipandang perlu disusun perencanaan penganggaran yang responsive gender. Ketiga : Dalam rangka pencapaian target RPJMD dan Renstra SKPD maka dalam setiap pelaksanaan Renja tahunan Dinas PPKB PP dan PA, dimaksudkan untuk menjabarkan dan melaksanakan berbagai rencana strategis, rencana aksi, dan program-program Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sekaligus starting point sebagai dasar pijakan dan berguna sebagai bahan evaluasi untuk tahun – tahun berikutnya.

Selain itu, penyusunan Renja Perubahan ini dilakukan dengan memperhatikan capaian hasil kinerja pembangunan pada tahun ini, ketersediaan sumber daya, isu strategis, sinergitas antar urusan, antar wilayah serta lintas sektor, lintas SKPD, serta kegiatan pendukung yang menjadi tupoksi SKPD dalam kerangka pencapaian Visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara: ***“Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing”***. Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan pengeja wantahan mandat yang diberikan untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan Program KB Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas PPKBPP dan PA mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan Daerah, penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pelaksanaan advokasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Dinas PPKB PP dan PA Tahun 2024 merupakan gambaran

**“Rencana Kerja Perubahan Dinas PPKB, PP dan PA “
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2024**

rencana prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuatkan analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, Rencana Kerja Perubahan Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 ini harus menampung dan mempunyai kemampuan dalam mewujudkan sasaran pembangunan kependudukan dan KB sekaligus menjadi program prioritas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas PPKBPP & PA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah S/D Triwulan II Tahun
2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERA

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat :

**“Rencana Kerja Perubahan Dinas PPKB, PP dan PA “
Kabupataen Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2024**

Kesimpulan

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPPKBPP dan PA Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcomes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2024 - 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis ini merupakan perencanaan jangka menengah Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas PPKB PP dan PA beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut, mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Selanjutnya untuk mewujudkan pencapaian target Renstra di atas dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD setiap tahunnya. Renja Perubahan Dinas PPKBPP & PA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PPKBPP & PA selama tahun 2024.

Pada Tahun 2024 total anggaran Dinas PPKBPPP & PA sebesar Rp. 8.687.927.617,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 7.642.935.209,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.044.992.408 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 8 program dan 23 kegiatan.

**“Rencana Kerja Perubahan Dinas PPKB, PP dan PA “
Kabupataen Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2024**

Belanja Operasi realisasi Rp. 1.802.412.860,00 (23,58%), Belanja Modal realisasi Rp. 44.650.000,00 (4,27) total realisasi sampai pada triwulan II adalah 1.847.062.860,00 (21,26%) Penyebab kecilnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini karena sebagian besar kegiatan belum dilaksanakan karena masih menunggu regulasi dan Surat Keputusan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan lain yang masih kecil penyerapan anggaran adalah DAK Fisik pada kegiatan pengadaan kendaraan Mobil Antar Jemput Akseptor dan Pengadaan Minilaparotomy dan Vasektomi Tanpa Pisau.

Sedangkan untuk capaian kinerja padatahun berjalan yaitu tahun 2024 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2024 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Dinas PPKBPP & PA Periode 2024-2026, dikarenakan Rencana Kerja 2026 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas PPKBPP & PA sampai dengan tahun berjalan dan pencapaian Renstra Dinas PPKBPP & PA sampai dengan tahun 2023 dapat di lihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupaten B...**

Kode	Urusan/Bidang g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Capaian Program/Has il Kegiatan/Kel uaran Sub Kegiatan	Target (Akhir) Renstra 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2023 Triwulan 2023			Prakiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renstra PD s.d Tahun 2024	Prakiraan Tingkat Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Renstra PD s.d Tahun 2024
					Target Kinerja Program dan Kegiatan(Renj aPerangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024 s.d Triwulan II	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 20234 s.d Triwulan II		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100 % (Target Positif) dan 8 = (6/7)*100% (Target Negatif)	9	10 = (9/4)*100% (Target Positif) dan 10 = (4/9)*100 (Target Negatif)
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2.14.01	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE	Persentase kelengkapan administrasi Keuangan, Presentase Kelengkapan Administrasi	100 %	100%	100%	46,57%	46,57%	100%	100%

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupatæn Bc**

	N/KOTA	Kepegawaia n, Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD							
2 14 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100%	100%	47,59%	47,59%	100%	100%
2 14 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 14 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	100%	100%	100%	31,51%	31,51%	100%	100%
2 14 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Aparatur yang megikuti Bimtek/Wor kshop/Pelati han dan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	2 Orang	2 Orang	5 Orang	5 Orang

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupaten Bt**

		Sejenisnya							
2 14 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	38,045%	38,045%	100%	100%
2 14 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya komponen instalasi listrik	100%	100%	100%	0	0	100%	100%
2 14 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	24,85%	24,85%	100%	100%
2 14 01 2.06 05	Penyediaan Barang	Persentase penyediaan	100%	100%	100%	0	0	100%	100%

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupaten Bo**

	Cetakan dan Penggandaan	belanja cetak dan penggandaan							
2 14 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase penyediaan rapat - rapat koordinasi / konsultasi SKPD	100%	100%	100%	51,24%	51,24	100%	100%
2 14 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%
2 14 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	4 unit	3 unit	3 unit	3 Unit (100%)	100%	100%	100%
2 14 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0	100%	100%

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupatæn Bc**

		lainnya							
2 14 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang urusan pemerintah n daerah	100%	100%	100%	44,34%	44,34%	100%	100%
2 14 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	41,72%	41,72%	100%	100%
2 14 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	100%	100%	100%	52,03%	52,03%	100%	100%
2 14 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	100%	39,27%	39,27%	100%	100%
2 14 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Pemeliharaa n barang milik daerah	100%	100%	100%	67,98%	67,98%	100%	100%

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupatæn Bc**

	Pemerintah n Daerah	penunjang urusan pemerintah n daerah							
2 14 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KDO yang terpelihara	6 Unit	4 Unit	5 Unit	5 Unit (35,97%)	5 Unit (35,97%)	5 Unit (100%)	5 Unit (100%)
2 14 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0	0	5 Unit	5 Unit
2 14 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupatæn Bc**

2 14 02	PROGRAM PENGENDA LIAN PENDUDUK	Persentase penyusunan dokumen kependuduk an	100%	100%	100%	33,70%	33,70%	100%	100%
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase pengendalia n kuantitas penduduk	100%	100%	90%	33,70%	33,70%	90%	90%
2 14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependuduka n (GDPK) Tingkat	Jumlah Dokumen Grand Desain Kependuduk an	1 Dokum en	1 Dokume n	1 Dokumen	33,70%	33,70%	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupaten Bo**

	Kabupaten/Kota								
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan pengendalian penduduk	100%	100%	90%	0	0	90%	90%
2 14 02 2.02 01	Perumusan Parameter Kependudukan	Persentase penyusunan dokumen profil kependudukan	100%	100%	100%	0	0	100%	100%
2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah kader yang dilatih untuk pendataan keluarga	467 Orang	467 Orang	467 Orang	0	0	467 Orang (100%)	467 Orang (100%)
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif	90%	80%	90%	73,26%	73,26%	90%	90%
2 14 03 2.01	Pelaksanaan	Persentase	100%	90%	100%	79,04%	79,04%	100%	100%

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupatæn Bc**

	KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	memahami desiminasi strategi advokasi KIE							
2 14 03 2.02	Pendayaguna an Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang Diberdayaka n	467 Orang	467 Orang	467 Orang	0	0	467 Orang (100%)	467 Orang (100%)
2 14 03 2.02 03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Jumlah Peserta yang Terlatih dalam Pengembangan Pengelola dan Pelaksanaan Advokasi, KIE dan Pencitraan (PLKB/PKB ,Kader, Bidan)	467 Orang	467 Orang	467 Orang	0	0	467 Orang (100%)	467 Orang (100%)

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupatæn Bt**

	(PKB/PLKB)								
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/K ota	Persentase Alat dan Obat Kontrasepsi yang didistribusik an	90%	80%	90%	67,48%	67,48%	90%	90%
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusia n Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Jumlah Akseptor yang dilayani	300 Aksept or	250 Akseptor	300 Akseptor	67,48%	67,48%	300 Akseptor (100%)	300 Akseptor (100%)

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupatæn Bc**

	Jejarinya								
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejarinya	Jumlah kader KB yang dibina	467 Kader	467 Kader	467 Kader	0	0	467 Kader (100%)	467 Kader (100%)
2 14 03 2.03 10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah petugas medis (dokter, bidan dan perawat) yang mengikuti pertemuan	30 Orang	20 Orang	30 Orang	0	0	30 Orang (100%)	30 Orang (100%)
2 14 03 2.04	Pemberdayaa n dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyaraka tan Tingkat Daerah	Persentase peran serta organisasi kemasyaraka tan dalam pelaksanaan dan pembinaan	85%	75%	85%	0	0	85%	85%

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupataen Bc**

	Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	kesertaan ber-KB							
2 14 03 2.04 01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah masyarakat yang peduli KB	24 Orang	20 Orang	25 Orang	0	0	25 Orang (100%)	25 Orang (100%)
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kader poktan dan bina keluarga	100%	90%	100%	72,87%	72,87%	100%	100%
2 14 04 2.01	Pelaksanaan	Persentase	100%	90%	100%	72,87%	72,87%	100%	100%

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupaten B...**

	Pembanguna n Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan n Keluarga	Bina keluarga yang dibina							
2 14 04 2.01 01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB	107 Kelom pok	107 Kelompo k	107 Kelompok	0	0	107 Kelompok (100%)	107 Kelompok (100%)

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupatæn Bc**

	Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)								
2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengurus PIK-R yang Mengikuti Pelatihan	75 Orang	65 Orang	75 Orang	0	0	75 Orang (100%)	75 Orang (100%)
2 14 04 2.01 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK	Jumlah forum pelayanan KRR bagi remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah	45 Forum	45 Forum	45 Forum	72,87%	72,87%	45 Forum (100%)	45 Forum (100%)

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupatæn Bc**

	R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)								
2 08	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDUN GAN ANAK								
2 08 02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDA YAAN PEREMPUA N	Indeks Pembanguna n Gender	95%	90%	95%	0	0	95%	95%
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusuta maan Gender (PUG) pada Lembaga	Persentase OPD yang melaksanaka n PPRG	100%	90%	100%	0	0	250 Orang (100%)	250 Orang (100%)

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupatæn Bc**

	Pemerintah Kewenangan Kabupaten/K ota								
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah aparatur yang terlatih PUG dan PPRG	250 Orang	100 Orang	250 Orang	0	0	250 Orang (100%)	250 Orang (100%)
2 08 02 2.02	Pemberdayaa n Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/K ota	Persentase Pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	70%	0	70%	0	0	15 Organisasi (100%)	15 Organisasi (100%)
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	15 Organisasi	10 Organisasi	15 Organisasi	0	0	15 Organisasi (100%)	15 Organisasi (100%)

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupatæn Bc**

	Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi								
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan kualitas keluarga	75%	75%	75%				
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesetaraan gender dan capaian KLA	75%	75%	75%	0	0	75%	75%
2 08 04 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan	Jumlah pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	30 Kasus	25 Kasus	25 Kasus	0	0	25 Kasus (100%)	25 Kasus (100%)

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupatæn Bc**

	Kabupaten/Kota								
2 08 04 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KG dan hak anak	100%	100%	100%	0	0	100%	100%
2 08 04 2.03 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam	Jumlah fasilitasi layanan PUSPAGA	19 Kali kali	15 Kali	2 Kali	0	0	2 Kali (100%)	2 Kali (100%)

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupatæn Bc**

	Daerah Kabupaten/Ko ta								
2 08 06	PROGRAM PEMENUHA N HAK ANAK (PHA)	Persentase Fasilitasi KLA	70%	60%	70%	0	0	70%	70%
2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerint ah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/K ota	Jumlah peserta yang terlatih dalam Pelembagaa n Pemenuhan Hak Anak pada Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	80 Orang	75 Orang	80 Orang	0	0	80 Orang (100%)	80 Orang (100%)
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan	Jumlah peserta terlatih mengenai	50 Orang	50 Orang	50 Orang	0	0	50 Orang (100%)	50 Orang (100%)

**“Rencana Kerja Perubahan I
Kabupatæn Bc**

	Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	pemenuhan hak anak							
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase KG dan hak anak	70%	60%	70%	20,83%	20,83%	70%	70%
2 08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas	Jumlah pendampingan forum anak	10 Kali	5 Kali	10 Kali	20,83%	20,83%	10 Kali (100%)	10 Kali (100%)

**"Rencana Kerja Perubahan I
Kabupatæn Bc**

	Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta								
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Fasilitator Layanan Anak Yang Terlatih	35 Orang	35 Orang	35 Orang	0	0	35 Orang (100%)	35 Orang (100%)

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan	Target (Akhir) Renstra 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024	Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2024 Trwulan 2024			Prakiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renstra PD s.d Tahun 2024	Prakiraan Tingkat Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Renstra PD s.d Tahun 2024
					Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024 s.d Trwulan II	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024 s.d Trwulan II		
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{(7/6) \times 100\%}{\text{(Target Positif) dan}}$ $8 = \frac{(6/7) \times 100\%}{\text{(Target Negatif)}}$	9	$10 = \frac{(9/4) \times 100\%}{\text{(Target Positif) dan}}$ $10 = \frac{(4/9) \times 100\%}{\text{(Target Negatif)}}$
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kelengkapan administrasi Keuangan, Presentase Kelengkapan Administrasi Kepegawaian, Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD	100 %	100%	100%	46,57%	46,57%	100%	100%
2 14 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	95%	100%	47,59%	47,59%	100%	100%
2 14 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	95%	100%	54,66%	54,66%	100%	100%
2 14 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	84,09%	100%	31,51%	31,51%	100%	100%
2 14 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Perundang-	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/Workshop/Pelatihan dan Sejenisnya	5 Orang	3 Orang	5 Orang	2 Orang	2 Orang	5 Orang	5 Orang

2 14 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	85,02%	100%	38,045%	38,045%	100%	100%
2 14 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya komponen instalasi listrik	100%	50%	100%	0	0	100%	100%
2 14 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	95%	100%	24,85%	24,85%	100%	100%
2 14 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan belanja cetak dan penggandaan	100%	97,61%	100%	0	0	100%	100%
2 14 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyediaan rapat - rapat koordinasi / konsultasi SKPD	100%	97,47%	100%	51,24%	51,24	100%	100%
2 14 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%
2 14 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	4 unit	3 unit	3 unit	3 Unit	100%	100%	100%
2 14 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0	0	100%	100%
2 14 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	96,11%	100%	44,34%	44,34%	100%	100%
2 14 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	41,72%	41,72%	100%	100%
2 14 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	100%	90,33%	100%	52,03%	52,03%	100%	100%
2 14 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	98%	100%	39,27%	39,27%	100%	100%
2 14 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	98,58%	100%	67,98%	67,98%	100%	100%
2 14 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas yang dipelihara	100%	95,75%	100%	35,97%	35,97%	100%	100%
2 14 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	5 Unit	4 Unit	5 Unit	0	0	5 Unit	5 Unit
2 14 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)	1 Unit (100%)

2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase penyusunan dokumen kependudukan	100%	100%	100%	33,70%	33,70%	100%	100%
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase pengendalian kuantitas penduduk	60%	49,36%	90%	33,70%	37,44%	90%	90%
2 14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Grand Desain Kependudukan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	33,70%	33,70%	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan pengendalian penduduk	80%	70%	80%	0	0	80%	80%
2 14 02 2.02 01	Perumusan Parameter Kependudukan	Persentase penyusunan dokumen profil kependudukan	100%	100%	100%	0	0	100%	100%
2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah kader yang dilatih untuk pendataan keluarga	467 Orang	467 Orang	467 Orang	0	0	467 Orang (100%)	467 Orang (100%)
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif	80%	70%	80%	73,26%	91,58%	80%	80%
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB	80%	70%	80%	79,04%	98,80%	80%	80%
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta yang memahami desiminasi strategi advokasi KIE	0	20 Orang	20 Orang	79,04%	79,04%	20 Orang	0
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah peserta yang memahami desiminasi strategi advokasi KIE	40 Peserta	30 Peserta	40 Peserta	0	0	40 Peserta (100%)	40 Peserta (100%)
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang Diberdayakan	467 Orang	467 Orang	467 Orang	0	0	467 Orang (100%)	467 Orang (100%)

2.14.3.2.02.3	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk Petugas Keluarga	Jumlah Peserta yang Terlatih dalam Pengerobangan Pengelola dan Pelaksanaan Advokasi, KIE dan Pencitraan (PLKB/PKB, Kader, Bidan)	467 Orang	467 Orang	467 Orang	0	0	467 Orang (100%)	467 Orang (100%)
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Alat dan Obat Kontrasepsi yang didistribusik an	85%	80%	85%	67,48%	79,38%	85%	85%
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Akseptor yang dilayani	300 Aksept or	250 Akseptor	300 Akseptor	67,48%	67,48%	300 Akseptor (100%)	300 Akseptor (100%)
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah kader KB yang dibina	467 Orang	467 Orang	467 Kader	0	0	467 Kader (100%)	467 Kader (100%)
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah petugas medis (dokter, bidan dan perawat) yang mengikuti pertemuan	30 Orang	20 Orang	30 Orang	0	0	30 Orang (100%)	30 Orang (100%)
2.14.03.2.04	Pemberdayaa n dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyaraka tan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota dalam	Persentase peran serta organisasi kemasyaraka tan dalam pelaksanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB	60%	50%	60%	0	0	60%	60%
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyaraka tan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah masyarakat yang peduli KB	25 Orang	20 Orang	25 Orang	0	0	25 Orang (100%)	25 Orang (100%)
2.14.04	PROGRAM PEMBERDA YAA N DAN PENINGKAT AN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kader poktan dan bina keluarga	70%	60%	70%	72,87%	104,10%	70%	70%
2.14.04.2.01	Pelaksanaa n Pembangua n Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahtera n Keluarga	Persentase Bina keluarga yang dibina	80%	70%	80%	72,87%	91,08%	80%	80%

2 14 04 2.01 01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok BKB	107 Kelompok	107 Kelompok	107 Kelompok	0	0	107 Kelompok (100%)	107 Kelompok (100%)
2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengurus PIK-R yang Mengikuti Pelatihan	75 Orang	65 Orang	75 Orang	0	0	75 Orang (100%)	75 Orang (100%)
2 14 04 2.01 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah forum pelayanan KRR bagi remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah	45 Forum	45 Forum	45 Forum	72,87%	72,87%	45 Forum (100%)	45 Forum (100%)
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	35%	29%	35%	0	0	35%	35%

2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutan maan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	50%	43%	50%	0	0	50%	50%
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah aparatur yang terlatih PUG dan PPRG	250 Orang	100 Orang	250 Orang	0	0	250 Orang (100%)	250 Orang (100%)
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	60%	505	60%	0	0	60%	60%
2 08 02 2.02	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	0	10 Organisasi	0	0	0	15 Organisasi (100%)	15 Organisasi (100%)
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan kualitas keluarga	0%	79%	75%	0	0	75%	75%
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesetaraan gender dan capaian KLA	0%	79%	75%	0	0	75%	75%
2 08 04 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	0	25 Kasus	0	0	0	25 Kasus (100%)	25 Kasus (100%)
2 08 04 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KG dan hak anak	70%	60%	70%	0	0	70%	70%

2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	50%	43%	50%	0	0	50%	50%
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah aparatur yang terlatih PUG dan PPRG	250 Orang	100 Orang	250 Orang	0	0	250 Orang (100%)	250 Orang (100%)
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	60%	505	60%	0	0	60%	60%
2 08 02 2.02	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	0	10 Organisasi	0	0	0	15 Organisasi (100%)	15 Organisasi (100%)
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan kualitas keluarga	0%	79%	75%	0	0	75%	75%
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesetaraan gender dan capaian KLA	0%	79%	75%	0	0	75%	75%
2 08 04 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	0	25 Kasus	0	0	0	25 Kasus (100%)	25 Kasus (100%)
2 08 04 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KG dan hak anak	70%	60%	70%	0	0	70%	70%

2 08 04 2.03 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi layanan PUSPAGA	2 Kali	15 Kali	2 Kali	0	0	2 Kali (100%)	2 Kali (100%)
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PIHA)	Persentase Fasilitasi KLA	80%	67%	80%	0	0	80%	80%
2 08 06 2.01	Pelembagaan PIHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang terlatih dalam Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	75 Orang	80 Orang	0	0	80 Orang (100%)	80 Orang (100%)
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta terlatih mengenai pemenuhan hak anak	50 Orang	50 Orang	50 Orang	0	0	50 Orang (100%)	50 Orang (100%)
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak	60%	50%	60%	20,83%	34,71%	60%	60%
2 08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan forum anak	10 Kali	5 Kali	10 Kali	20,83%	20,83%	10 Kali (100%)	10 Kali (100%)
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitator Layanan Anak Yang Terlatih	35 Orang	20 Orang	35 Orang	0	0	35 Orang (100%)	35 Orang (100%)

2 08 04 2.03 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi layanan PUSPAGA	2 Kali	15 Kali	2 Kali	0	0	2 Kali (100%)	2 Kali (100%)
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHIA)	Persentase Fasilitasi KLA	80%	67%	80%	0	0	80%	80%
2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang terlatih dalam Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	75 Orang	80 Orang	0	0	80 Orang (100%)	80 Orang (100%)
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta terlatih mengenai pemenuhan hak anak	50 Orang	50 Orang	50 Orang	0	0	50 Orang (100%)	50 Orang (100%)
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak	60%	50%	60%	20,83%	34,71%	60%	60%
2 08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan forum anak	10 Kali	5 Kali	10 Kali	20,83%	20,83%	10 Kali (100%)	10 Kali (100%)
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitator Layanan Anak Yang Terlatih	35 Orang	20 Orang	35 Orang	0	0	35 Orang (100%)	35 Orang (100%)

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan penjabaran RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabe 3.1

Tabel 3.2
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kode	SKPD / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF RENJA PERUBAHAN 2024	BERKURANG/ BERTAMBAH	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNGJAWAB
			APBD 2024	P - APBD 2024				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	7	30	10 + 9.8			11
		(2)								
1.1	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kelengkapan administrasi Keuangan, Persentase Kelengkapan Administrasi Kepegawaian, Persentase Kelengkapan Administrasi Pengelolaan BMD	98%	100%	3.597.549.754	3.260.284.339		Penanggulangan Kemiskinan	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	DINAS PPKBPPPA
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.839.721.030	2.839.670.030	299.949.000			DINAS PPKBPPPA
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	2.539.721.030	2.839.670.030	299.949.000			DINAS PPKBPPPA
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	80%	26.936.800	26.936.800				DINAS PPKBPPPA
3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/Workshop/Pelatihan dan Sejenisannya	5 Kali	0	26.936.800	26.936.800				DINAS PPKBPPPA
3.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	319.864.684	337.031.584	17.166.900			DINAS PPKBPPPA
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan belanja cetak dan penggandaan	50 Item	0	10.187.494	10.187.494				DINAS PPKBPPPA
3.4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya komponen instalasi listrik	100%	100%	7.717.574	7.717.574				DINAS PPKBPPPA
3.5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Bh	6 Bh	31.635.716	31.635.716				DINAS PPKBPPPA
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyediaan rapat - rapat koordinasi / konsultasi SKPD	25 Kali	0	270.323.900	287.490.800				DINAS PPKBPPPA
4.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	181.449.400	181.227.400				DINAS PPKBPPPA
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	0	15.000.000	4.020.000				DINAS PPKBPPPA
	Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Pejabat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0	39.609.400	39.609.400				DINAS PPKBPPPA
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KDO yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	71.860.000	71.860.000				DINAS PPKBPPPA
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	15.000.000	15.000.000				DINAS PPKBPPPA
	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	25.000.000	25.000.000				DINAS PPKBPPPA
5.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100%	100%	186.475.711	1.044.992.408				DINAS PPKBPPPA
5.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	0	47.000.000	46.884.200				DINAS PPKBPPPA
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	0	109.475.711	184.108.208				DINAS PPKBPPPA
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional yang diadakan			-	814.000.000				DINAS PPKBPPPA

6.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	263.400.680	247.497.528				DINAS PPKBPPPA
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	100%	100%	35.000.000	30.004.388				DINAS PPKBPPPA
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	224.565.480	213.658.140	10.907.340			DINAS PPKBPPPA
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	100%	3.835.200	3.835.000				DINAS PPKBPPPA
7.1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Fasilitas KLA	80%	70%	101.000.000	101.500.000		Penangguhagn Kemiskinan	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	DINAS PPKBPPPA
7.2	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang terlatih dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak pada Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	80 OK	80 OK	2.000.000	2.375.000				DINAS PPKBPPPA
7.3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta terlatih mengenai pemenuhan hak anak	50 Orang	0	2.000.000	2.375.000				DINAS PPKBPPPA
7.5	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase KG dan hak anak	60%	60%	99.000.000	99.125.000				DINAS PPKBPPPA
7.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan forum anak	10 Kali	0	17.500.000	17.500.000				DINAS PPKBPPPA
8	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	Jumlah Fasilitator Layanan Anak Yang Terlatih	35 Orang	0	3.000.000	3.125.000				DINAS PPKBPPPA
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase perlindungan anak korban kekerasan yang terlayani	0	0	-	581.212.688		Penangguhagn Kemiskinan	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	DINAS PPKBPPPA
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak	0	0	-	179.337.240				DINAS PPKBPPPA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	-	179.337.240				DINAS PPKBPPPA
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan anak korban kekerasan	0	0	-	300.216.308				DINAS PPKBPPPA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	-	300.216.308				DINAS PPKBPPPA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penguatan lembaga layanan korban kekerasan terhadap anak	0	0	-	101.659.140				DINAS PPKBPPPA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	-	101.659.140				DINAS PPKBPPPA
8.1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	35%	35%	8.000.000	508.150.650		Penangguhagn Kemiskinan	Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PPKBPPPA
8.2	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	50%	50%	5.000.000	5.045.958				DINAS PPKBPPPA
9	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah aparatur yang terlatih PUG dan PPRG	250 Orang	0	5.000.000	5.045.958				DINAS PPKBPPPA
9.1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	0	60%	3.000.000	503.104.692				DINAS PPKBPPPA
9.2	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	0	0	3.000.000	503.104.692				DINAS PPKBPPPA

	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Perempuan korban kekerasan	0	0	-	61.304.690		Penanggulangan Kemiskinan	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	DINAS PPKBPPPA
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan	Persentase pembentukan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	0	0	-	61.304.690				DINAS PPKBPPPA
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	-	61.304.690				DINAS PPKBPPPA
10.1	PROGRAM Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan kualitas keluarga	0	75%	5.000.000	5.407.176		Penanggulangan Kemiskinan	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	DINAS PPKBPPPA
10.2	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	Persentase kesetaraan gender dan capaian KLA	0	75%	2.000.000	2.375.000				DINAS PPKBPPPA
11	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	0	0	2.000.000	2.375.000				DINAS PPKBPPPA
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KG dan hak anak	70%	60%	3.000.000	3.032.176				DINAS PPKBPPPA
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas PUSPAGA	2 Kali	0	3.000.000	3.032.176				DINAS PPKBPPPA
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Baru dan KB Aktif	80%	60%	255.500.000	9REPI		Penanggulangan Kemiskinan	Menurunkan Angka Kemiskinan	DINAS PPKBPPPA
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB	80%	60%	5.500.000	646.399.800				DINAS PPKBPPPA
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta Sosialisasi Kependudukan dan KB	0	0	10.000.000	10.000.000				DINAS PPKBPPPA
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah peserta yang memahami desiminasi strategi advokasi KIE	40 Peserta	0	3.550.000	8.750.000	5.200.000			DINAS PPKBPPPA
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0	0	-	78.000.000				DINAS PPKBPPPA
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	0		0	288.900.000				DINAS PPKBPPPA
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0		230.499.700	260.749.800	30.250.100			DINAS PPKBPPPA
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang Diberdayakan	467 Orang	467 Orang	204.000.000	519.900.000				DINAS PPKBPPPA
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	9 Laporan	9 Laporan	204.000.000	168.000.000	36.000.000			DINAS PPKBPPPA
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0	467 Kader	-	279.900.000				DINAS PPKBPPPA
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Alat dan Obat Kontrasepsi yang didistribusikan	85%	85%	7.500.000	294.789.937				DINAS PPKBPPPA
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0%	0%	-	251.368.706				DINAS PPKBPPPA
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah kader KB yang dibina	467 Orang	467 Orang	2.500.000	7.000.000				DINAS PPKBPPPA

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Akseptor yang dilayani	300 Kali/Kecamatan	0		2.500.000	33.925.958			DINAS PPKBPPPA
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah petugas medis (dokter, bidan dan perawat) yang mengikuti pertemuan	30 Orang	0		2.500.000	2.495.273			DINAS PPKBPPPA
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase peran serta organisasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB	60%	55%		2.500.000	#REF!			DINAS PPKBPPPA
Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah masyarakat yang peduli KB	25 Orang	0		2.500.000	#REF!			DINAS PPKBPPPA
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0	1 Dokumen		-	9.000.000			DINAS PPKBPPPA
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	0	32 Kampung KB		-	248.000.000			DINAS PPKBPPPA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kader poktan dan bina keluarga	70%	50%		7.500.000	1.056.598.352	<i>Penanggulangan Kemiskinan</i>	<i>Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran</i>	DINAS PPKBPPPA
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Bina keluarga yang dibina	80%	60%		7.500.000	1.056.598.352			DINAS PPKBPPPA
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0%	100%		-	360.000.000			DINAS PPKBPPPA
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Jumlah Pengurus PIK-R yang Mengikuti Pelatihan	75 Orang	0		2.500.000	2.499.317			DINAS PPKBPPPA
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina	Jumlah Kelompok BKB	107 Kelompok	107 Kelompok		2.500.000	2.500.000			DINAS PPKBPPPA
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah forum pelayanan KRR bagi remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah	45 Forum	45 Forum		2.500.000	17.499.035			DINAS PPKBPPPA
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	0	467 Kader		-	674.100.000			DINAS PPKBPPPA
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	- Persentase penyusunan dokumen kependudukan	100%	80%		9.000.000	26.776.100	<i>Penanggulangan Kemiskinan</i>	<i>Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran</i>	DINAS PPKBPPPA
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian kuantitas penduduk	60%	50%		5.000.000	24.777.315			DINAS PPKBPPPA
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen		5.000.000	24.777.315			DINAS PPKBPPPA
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan pengendalian penduduk	80%	65%		4.000.000	1.998.785			DINAS PPKBPPPA
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah kader yang dilatih untuk pendataan keluarga	467 Orang	467 Orang		2.000.000	149.893.165			DINAS PPKBPPPA
Perumusan Parameter Kependudukan	Persentase penyusunan dokumen profil kependudukan	0	100%		2.000.000	1.998.785			DINAS PPKBPPPA
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem	0	100%		-	64.200.000			DINAS PPKBPPPA
JUMLAH		77,16%	65,83%		8.690.243.636	8.690.117.680			DINAS PPKBPPPA

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Dengan adanya penetapan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Periode 2024 Ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Dinas PPKBPP & PA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat serta memberikan gambaran bagi Pemerintahan Daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja PD dalam rangka pencapaian hasil kinerja. Keberhasilan program kegiatan Dinas PPKBPP & PA dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, Mengingat Dinas PPKBPP & PA Juga mengemban tugas penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RENJA Perubahan Dinas PPKBPP & PA dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja OPD di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

IV.2 Catatan yang Perlu Mendapat Perhatian

Adanya Program **Bangga Kencana** yang dicanangkan oleh BKKBN Pusat yang harus menjadi perhatian penting untuk Dinas PPKBPP & PA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai salah satu wujud keseriusan tugas dan fungsi BKKBN dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang, guna mendukung tercapainya Indonesia maju Yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan, di Dinas PPKBPP & PA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hanya ada beberapa SDM yang Kompeten di bidang pelayanan Keluarga Berencana yang kurang memadai untuk mewujudkan gerakan tersebut.

IV.3 Kaidah-kaidah Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (RENJA)

Dinas PPKBPP & PA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat,

Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas PPKBPP & PA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

- a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan

**“Rencana Kerja Perubahan PPKB, PP dan PA “
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2024**

pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

- b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

IV.4 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2023 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.